

ABSTRAK

Pemerintah serius dalam membentuk kualitas aparatur negara yang baik karena merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Aparatur Negara dituntut agar mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. Pemerintah Daerah Deli Serdang hadir melalui pelayanan bagi masyarakat dengan menjaga citra kepegawaian melalui profesionalitas dan integritas, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS khususnya yang berada di Kabupaten Deli Serdang.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penerapan sanksi disiplin terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, melakukan identifikasi faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam proses penerapan sanksi disiplin terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang bila tidak puas terhadap sanksi yang dijatuhkan kepadanya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis-empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder sebagai data pendukung dengan metode pengumpulan data survey serta metode analisis data adalah analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian penulisan hukum ini, maka dapat diketahui bahwa prosedur penerapan sanksi disiplin terhadap kasus pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di Pemerintahan Daerah Deli Serdang sudah sesuai dan mengikuti peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan *pertama* berupa pemanggilan dan pemeriksaan oleh atasan langsung; *kedua*, dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP) apabila hasil pemeriksaan belum memberikan dampak atau efek apapun pada pelaku pelanggaran; dan *ketiga*, melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi, pembentukan peraturan bupati, dan pengawasan yang ketat menjadi aspek yang penting dalam mengontrol terhadap pelanggaran disiplin, serta upaya hukum melalui upaya administratif hingga pengujian oleh peradilan tata usaha negara.

Kata Kunci: Prosedur, Penerapan Sanksi, Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah Deli Serdang